

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSEBILITAS  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA**

**M. Lutfi Al Fahmi**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe  
m.lutfi@stie-lhokseumawe.ac.id

**Zulkarnaini**

Politeknik Negeri Negeri Lhokseumawe  
zulkarnaini@pnl.ac.id

**Fauzan**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe  
fauzan@stie-lhokseumawe.ac.id

**Bobby Rahman**

Universitas Malikussaleh  
bobby.rahman@unimal.ac.id

**Maulidin**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe  
maulidin@stie-lhokseumawe.ac.id

**Athailah**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe  
athailah@stie-lhokseumawe.ac.id

**ABSTRACT**

*This literatur target to examine the impact of regional financial accessibility and the presentation of financial reports on the accountability of regional financial management in the North Aceh Region. The researchers employed purposive sampling to collect primary data from a sample of 104 individuals. Multiple linear regression analysis and standard assumption tests were conducted to assess the relationship between the independent variables and the dependent variable. The findings indicate that the accountability of regional financial management in the North Aceh Region is significantly influenced by the accessibility of regional financial resources. However, the introduction of budget summaries does not have a substantial impact on the accountability of territorial financial management in the same region. Furthermore, the study demonstrates that the availability of regional finance and the introduction of financial reports significantly affect the accountability of regional financial management in the North Aceh Region.*

**Keywords:** *Presentation of financial reports, financial accessibility, financial management accountability*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak aksesibilitas keuangan daerah dan pemaparan laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Daerah Aceh Utara. Para peneliti menggunakan purposive sampling untuk mengumpulkan data primer dari sampel 104 orang. Analisis regression multiple berganda dan uji asumsi standar dilakukan untuk menilai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Daerah Aceh Utara dipengaruhi secara signifikan oleh aksesibilitas sumber keuangan daerah. Namun, pengenalan ringkasan anggaran tidak berdampak besar pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di daerah yang sama. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan keuangan daerah dan pengenalan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Daerah Aceh Utara.

**Kata Kunci:** Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada pemda dalam memajemen sistem pengelolaan keuangan provinsi dan mencapai kemandirian daerah. Dengan tersedianya informasi finansial akurat dan terbuka kepada publik, akuntabilitas manajemen finansial daerah dapat ditingkatkan. Tanggung jawab administratif provinsi mencakup semua aspek pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan tata kelola. Sangat penting untuk memperkenalkan inisiatif ini kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Gerakan ini berfungsi sebagai langkah penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang efektif di tingkat daerah. (Saragih 2015). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan agar tidak menimbulkan kekhawatiran dan mengurangi kepercayaan publik terhadap keakuratan laporan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dapat dicapai melalui praktik akuntansi yang tepat dan pembuatan laporan keuangan yang komprehensif. Data laporan keuangan harus bisa dilihat oleh masyarakat sesuai terhadap undang-undang yang relevan, seperti UU No. 14 Tahun 2008 terkait kebebasan akses publik, PP No. 65 Tahun 2010 terkait mekanisme distribusi informasi finansial, dan Qanun Aceh No. 12 Tahun 2019 terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Langkah-langkah ini diterapkan

untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, dapat mengakses dan menganalisis informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja secara efektif. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menetapkan kerangka hukum pengaplikasian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua di daerah. Peraturan ini secara khusus berfokus pada penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu pasal pada ketetapan tersebut menekankan kewajiban pemerintah daerah (PEMDA) untuk sepenuhnya mengadopsi dan mengimplementasikan SAP berbasis akrua secara bersamaan mulai tahun anggaran 2015. Disebutkan, syarat ini harus dipenuhi dalam waktu empat tahun sejak tahun anggaran 2010, yakni pada 2019. Selain itu, regulasi pencatatan keuangan Kabupaten Aceh Utara diatur dalam Pergub no. 22 Tahun 2016, Perbup Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2016. Penyediaan laporan keuangan yang mudah diakses memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Sebagaimana dicatat oleh Mulyana (2006), ketersediaan laporan keuangan yang dapat dipahami sangat penting untuk memastikan akuntabilitas yang efektif. Dalam demokrasi terbuka, berbagai platform media massa memainkan peran penting dalam terlibat langsung atau mendorong akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Outlet media ini berfungsi sebagai saluran di mana publik dapat memperoleh akses yang diperlukan ke laporan keuangan dan tetap mendapat informasi secara transparan. (Mulyana 2006). Menurut PP 24 Tahun 2005, pemda wajib menyajikan laporan finansial yang memenuhi kriteria kualitatif laporan finansial, yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Penyusunan laporan keuangan berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan transparansi, yang mendukung akuntabilitas dengan memungkinkan pengawasan kegiatan pemerintah yang berhubungan terkait manajemen publik. Pengelola keuangan daerah memberikan pertanggungjawaban internal dengan memberikan (LKPD) Kabupaten Aceh Utara kepada pegawai dan auditor internal. Laporan ini berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban internal dalam organisasi. Di sisi lain, Laporan finansial Pemkab Aceh Utara berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau masyarakat umum. Pihak dari luar ini mengandalkan data akuntansi yang tersedia guna membuat keputusan berdasarkan informasi yang bersifat politik, sosial, dan ekonomi. Laporan keuangan memainkan peran penting

dalam memungkinkan pemangku kepentingan eksternal untuk menilai kinerja keuangan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan berupa rumusan masalah berfokus melihat pengaruh aksesibilitas keuangan dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara. Kajian ini berusaha untuk memberikan wawasan dan jawaban mengenai aspek-aspek tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan berkontribusi pada pengetahuan tentang topik tersebut.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Penyajian Laporan Keuangan**

Selaras pada PP 71 Tahun 2010, laporan finansial dirancang guna menjadi sumber informasi tentang posisi keuangan, sisi pelapor dan segala perputaran keuangan yang diterapkan dalam rentang waktu tertentu. Laporan keuangan ini memaparkan secara rinci posisi keuangan entitas pelapor dan proses transaksi. Laporan ini berperan penting dalam membangun akuntabilitas dengan memberikan transparansi dan memungkinkan pengawasan dan evaluasi kegiatan keuangan yang efektif. (Hehanussa 2015). Dimasukkannya laporan anggaran sangat penting, seperti yang ditekankan oleh Diamond (2002), karena pengungkapan informasi tersebut merupakan aspek mendasar dari transparansi dan tanggung jawab keuangan. Mengacu pada PP 71 Tahun 2010, paragraf 49 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), berbagai item perlu dilaporkan, termasuk pajak, aset, investasi, dan lain-lain. Pengurangan ini memberi pemangku kepentingan gambaran menyeluruh tentang aset dan kewajiban entitas pelapor, yang menunjukkan pentingnya mengungkapkan investasi jangka pendek dalam laporan anggaran. Cakupan ketetapan PP 71 Tahun 2010 diantaranya SAP Berbasis Tunai Menuju Akrua. Implementasi SAP ini diwajibkan bagi seluruh entitas pelapor dari pusat ataupun daerah mulai Oktober 2010. Namun, diberikan waktu perpindahan kepada pihak yang belum sepenuhnya mengadopsi SAP ini. Selama periode ini, mereka diizinkan untuk menggunakan SAP Berbasis Tunai Menuju Akrua hingga tahun 2014. Hal ini memungkinkan pengaplikasian SAP ini. Sesuai peraturan, SAP Cash Based Towards Accrual adalah sistem yang tidak hanya mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan secara akrua. Ini juga mencakup

pengakuan kepemilikan, tanggung jawab, dan dana berdasarkan basis akrual. Dengan begitu sistem ini memberikan pendekatan pelaporan keuangan yang komprehensif dengan mempertimbangkan arus masuk dan arus keluar sumber daya, serta perubahan aset, kewajiban, dan dana yang terkait. Implementasi SAP Berbasis Akrual dituangkan dalam Pasal 7 peraturan yang mengamanatkan pendekatan bertahap. Pemerintah pusat yang diawasi oleh Menteri Keuangan secara bertahap akan mengadopsi SAP Berbasis Akrual, sedangkan pelaksanaannya untuk pemerintah daerah diawasi oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan tersebut menetapkan bahwa SAP Berbasis Akrual akan diterapkan secara bertahap di seluruh instansi pemerintah. Laporan keuangan sektor publik berfungsi sebagai representasi komprehensif dari posisi keuangan entitas sektor publik yang dihasilkan dari transaksi mereka. Selain memfasilitasi pengambilan keputusan yang terinformasi, laporan ini memainkan peran penting dalam menunjukkan akuntabilitas organisasi pada kepemilikan yang diserahkan. Untuk memastikan laporan finansial dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas, catatan disertakan untuk meningkatkan pemahaman mereka di luar beberapa orang terpilih. Catatan ini memberikan informasi tambahan, membuat laporan keuangan lebih komprehensif dan mengurangi kemungkinan salah tafsir. Konsekuensinya, mengubah laporan keuangan menjadi catatan meningkatkan transparansi dan meningkatkan pemahaman yang keakuratan informasi pada laporan. (PP No. 24 Tahun 2005).

### **Akseibilitas Keuangan Daerah**

Selaras dengan UU No. 33 Tahun 2004, informasi pada mekanisme keuangan daerah bersifat open data dan harus terbuka untuk publik. Undang-undang ini menekankan hak masyarakat untuk memperoleh laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemda. Akibatnya, Pemda berkewajiban untuk menyediakan akses publik terhadap laporan keuangan tersebut sesuai dengan persyaratan ini. Mulyana (2006) menyoroti pentingnya memastikan kemudahan akses ke laporan keuangan, memungkinkan akses mudah ke informasi yang relevan. Penting agar laporan keuangan secara jelas dan efektif, melayani individu yang tertarik dan bersedia menginvestasikan waktu untuk memahaminya. Dengan memfasilitasi aksesibilitas, laporan keuangan tidak hanya bermanfaat bagi publik dengan memberikan

informasi yang berharga tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan. (Rohman, 2009:112). Dalam demokrasi terbuka, media massa berperan penting dalam menyediakan akses ke laporan keuangan. Mereka berfungsi sebagai platform dan forum yang mempromosikan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat dengan secara aktif menarik perhatian dan mendorong transparansi (Sande, 2013). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan mereka. Ini melibatkan lebih dari sekedar menyampaikan laporan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Hal ini juga memerlukan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh laporan tersebut. Dengan meningkatkan aksesibilitas, pemerintah daerah menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam laporan finansial pemerintah daerahnya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk tetap mendapat informasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan. (Aliyah, Siti ; Nahar 2012). Laporan keuangan memiliki keterbatasan yang melekat dalam mencapai akuntabilitas penuh karena berbagai faktor. Salah satu batasan tersebut adalah kemungkinan informasi penting yang diinginkan pengguna untuk tidak disertakan dalam laporan ini. Selain itu, aksesibilitas laporan keuangan bagi calon pengguna dapat menimbulkan tantangan, menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Lopez-Arceiz, Pérezgrueso, dan Torres (2017) berpendapat bahwa keterbukaan dan akuntabilitas lembaga belum bisa diukur langsung, tetapi dapat dinilai dengan mengevaluasi aksesibilitasnya kepada pemangku kepentingan. Sejauh mana pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses informasi dan terlibat dengan laporan keuangan organisasi berfungsi sebagai indikator transparansi dan akuntabilitasnya.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Mengacu pada Mahsun (2016), akuntabilitas dapat didefinisikan menjadi dua cara yang berbeda. Dalam arti yang lebih luas, akuntabilitas mengacu pada kewajiban pihak yang diberi amanat untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan menyampaikan segala kegiatannya kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas keuangan secara khusus berkaitan dengan tanggung jawab untuk memastikan

integritas keuangan, mengungkapkan informasi keuangan, dan mematuhi peraturan dan undang-undang. Tujuan akuntabilitas keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan mematuhi peraturan dan pedoman terkait mengenai penyimpanan, penerimaan, dan alokasi dana oleh organisasi pemerintah. (LAN dan BPKP, 2003). Mulyana (2006) berpendapat bahwa akuntabilitas berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi masalah asimetri informasi. Teori asimetri informasi penutupan memperlihatkan terdapat beda signifikan antara jumlah informasi yang tersedia untuk konstituen atau individu di luar manajemen dan orang-orang dalam manajemen yang memiliki akses langsung ke informasi. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pengelolaan finansial daerah. Menjamin masyarakat dalam memperoleh laporan finansial pemerintah yang selaras dengan ketetapan standar akuntansi merupakan contoh dari upaya akuntabilitas. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, investor, masyarakat, dan lembaga pemeriksa dapat memantau pengelolaan keuangan daerah oleh yang bertanggungjawab. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontrol agar akuntabilitas bisa berkembang dalam manajemen finansial daerah (Fauziah, 2017: 89). Menurut Supardi (2017), indikator akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan antara lain:

1. Terbuka, cepat dan tepat.
2. Selaras ketentuan hukum dan regulasi.
3. Perancangan APBD.
4. Pertanggung jawaban kepada publik.
5. Memantau peforma manajemen.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Kajian ini berfokus pada pemaparan aksesibilitas laporan keuangan, akuntabilitas dan keuangan daerah Kabupaten Aceh Utara. Populasi yang digunakan terdiri dari pegawai Eselon III dan V yang bekerja di lembaga Keuangan Organisasi dan Dinas Pemerintah Daerah Aceh Utara. Peneliti menggunakan strategi purposive sampling untuk penelitian ini. Pengambilan sampel purposif melibatkan kriteria yang ditetapkan sebagai dasar pemilihannya (Arikunto, 2011). Dalam hal ini, ukuran sampel adalah 104. Data untuk kajian ini diperoleh melalui kuesioner dan penelitian lapangan. Analisis regresi berganda dipilih sebagai pendekatan analisa karena memungkinkan mengukur pengaruh instrumen penelitian. Peneliti akan memakai

software SPSS v.24.0 untuk mengolah data. Hasil pengolahan akan dianalisis dengan menerapkan uji validitas dan reliabilitas, uji hipotesis dan uji asumsi klasik guna mencapai tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Validitas**

Pengujian ini berguna menilai keakuratan dan keefektifan suatu kuesioner. Sebuah survei dianggap valid dan reliabel jika berhasil mengukur aspek-aspek yang ingin ditangkapnya, dengan koefisien validitas melebihi nilai ambang batas yang disarankan yaitu 0,3. Hasil pengujian validitas dipaparkan di bawah ini :

**Tabel 1 Uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>No Item</b>	<b>Koefisien Validitas</b>	<b>Nilai Kritis</b>	<b>Keterangan</b>
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	PLK1	0,47	0,3	Valid
	PLK2	0,399	0,3	Valid
	PLK3	0,324	0,3	Valid
	PLK4	0,466	0,3	Valid
Aksesibilitas Keuangan Daerah (X2)	AKD1	0,692	0,3	Valid
	AKD2	0,547	0,3	Valid
	AKD3	0,558	0,3	Valid
	AKD4	0,325	0,3	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	APK1	0,439	0,3	Valid
	APK2	0,682	0,3	Valid
	APK3	0,77	0,3	Valid
	APK4	0,394	0,3	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24

### **Uji Reliabilitas**

Kajian ini menggunakan Cronbach's Alpha untuk menilai reliabilitas alat ukur penelitian. Tabel 2 menunjukkan bahwa suatu konstruk (variabel) dianggap dapat diterima jika koefisien reliabilitasnya melebihi 0,3. Koefisien ini berfungsi sebagai ukuran konsistensi internal dan keandalan konstruk.



**Tabel 2 Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Jumlah Responden	Butir Pernyataan	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
1	Penyajian Laporan Keuangan	104	4	0,634	0,3	Reliabel
2	Aksesibilitas Keuangan Daerah	104	4	0,728	0,3	Reliabel
3	Akuntabilitas Pengelolaan	104	4	0,764	0,3	Reliabel

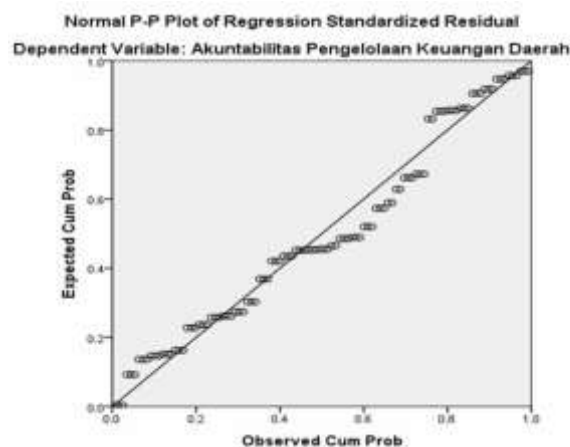
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24

### **Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Ghozali (2013), pengujian ini bisa diterapkan memakai dua pendekatan yaitu analisis grafis dan statistik, khususnya uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Gambar 2 menggambarkan hasil uji normalitas yang diterapkan memakai SPSS 24.0. Tes ini membantu menentukan apakah data mengikuti distribusi normal, yang penting untuk analisis dan asumsi statistik tertentu:

**Gambar 2 Uji Normalitas**



Berdasarkan hasil SPSS 24.0 yang ditampilkan pada Gambar 2 terlihat bahwa data menyimpang dari garis miring memperlihatkan data tidak berdistribusi normal.

Guna menilai normalitas dapat dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) memakai SPSS 24.0 dan analisis statistik. Hasil tes K-S disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3 Uji Normalitas Uji Kolmogrov Smirnov (K-s)**

N		104
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	16.8076923
	Std. Deviation	.43090221
Most Extreme Differences	Absolute	.226
	Positive	.217
	Negative	-
		.226
Test Statistic		2.306
Asymp. Sig. (2-tailed)		.094 <sup>c</sup>

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24

Menurut Ghozali (2013), uji (K-S) dapat diterapkan guna menentukan apakah suatu distribusi data normal. Jika skor diatas 0,05, berarti data mengikuti distribusi normal. Pada hasil Output SPSS 24.0, Tabel 4.11 menampilkan nilai K-S untuk Asymp sebesar 2.306, dan skor Sig. (2-tailed) sejumlah 0,094. Maka bisa dikatakan instrumen yang dipakai terdistribusi normal.

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 4 Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	9.821	1.868		5.257	.000
	Penyajian Laporan Keuangan	.116	.115	.116	1.013	.314
	Aksesibilitas Keuangan Daerah	.300	.126	.272	2.384	.019

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24

Berdasarkan tabel di atas dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,116 X1 + 0,300 X2 + \varepsilon$$

Koefisien regresi Penyajian Laporan Keuangan (X1) adalah sejumlah 0,116. Temuan ini memperlihatkan setiap satu persen kenaikan penyajian laporan keuangan, maka tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah diperkirakan akan meningkat sejumlah 0,116 satuan dengan asumsi koefisien variabel lain tidak berubah. Mengenai Aksesibilitas Keuangan Daerah (X2), koefisien regresi adalah 0,300. Artinya, setiap kenaikan satu persen Aksesibilitas Moneter Daerah, maka tingkat Tanggung Jawab Penyelenggaraan Moneter Wilayah diperkirakan akan meningkat sejumlah 0,300 satuan dengan asumsi koefisien variabel tidak berubah.

**Uji Statistik**  
**Uji Parsial**

**Tabel 5 Uji Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	9.821	1.868		5.257	.000
Penyajian Laporan Keuangan	.116	.115	.116	1.013	.314
Aksesibilitas Keuangan Daerah	.300	.126	.272	2.384	.019

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24

Tingkat signifikansi Penyajian Laporan Keuangan adalah 0,314 yang signifikansinya diatas 0,05. Nilai t adalah 1,013, sedangkan nilai t kritis adalah 1,660. Maka dapat diartikan bahwa pemaparan laporan keuangan mempunyai pengaruh yang berarti pada akuntabilitas keuangan daerah di Daerah Aceh Utara. Demikian pula untuk Aksesibilitas Keuangan Daerah, tingkat signifikansinya adalah 0,019 yang mana dibawah tingkat signifikansi 0,05. skor t sejumlah 2,384, sedangkan skor t kritis sejumlah 1,660. Karena skor t diatas skor t kritis (2,384 >

1,660), dapat diartikan terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas dan aksesibilitas keuangan.

**Uji Simultan**

**Tabel 6 Uji Simultan**

Model	Squares	Sum of	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19.125	2	9.562	7.153	.001 <sup>b</sup>
	Residual	135.029	101	1.337		
	Total	154.154	103			

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24

Tingkat signifikansi uji ini adalah  $\alpha = 5\%$ , dengan derajat kebebasannya  $df1$  (jumlah variabel -1) =  $3 - 1 = 2$  dan  $df2$  ( $n - \text{jumlah variabel}$ ) =  $104 - 3 = 101$ . Kemudian setelah memperhatikan tabel F, maka ditemukan skor 3,09. Berdasarkan tabel tersebut dapat diperhatikan bahwa skor F hitung sebesar 7,153 dengan tingkat probabilitasnya  $> 0,001$ . Dari kedua perhitungan diketahui bahwa F hitung  $> F$  tabel yaitu  $7,153 > 3,09$  dan nilai probabilitasnya ( $0,001 < 0,05$ ) yang memperlihatkan variabel laporan keuangan dan aksesibilitas keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Utara.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 7 Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.352 <sup>a</sup>	.427	.107	1.15625	2.762

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24

Berdasarkan tabel yang disajikan, koefisien determinasi adalah 0,427 yang setara dengan 42,7%. Temuan ini memperlihatkan skor pengaruh gabungan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas keuangan daerah adalah sebesar 42,7% dari variasi yang diamati dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di

Kabupaten Aceh Utara. Namun, penting untuk dicatat bahwa 57,3% sisanya dari variasi disebabkan dari aspek-aspek diluar pertimbangan dari kajian ini. Variabel-variabel yang tidak teruji tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor tambahan di luar cakupan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Temuan analisis memperlihatkan skor *p-value* sejumlah 0,314 menunjukkan bahwa analisis yang dilakukan tidak mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya nilai *t* hitung sebesar 1,013 lebih rendah dari skor *t* tabel sebesar 1,660 memperlihatkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel tersebut. Oleh karena itu, hipotesis bahwa laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas tidak didukung oleh temuan tersebut. Hasil ini selaras dengan temuan Sumiyati pada tahun 2015 yang juga menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara akuntabilitas pengelolaan dengan penyajian keuangan. Penyediaan laporan keuangan daerah yang komprehensif, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sangat penting dalam memastikan pengawasan dan pengawasan pengelolaan keuangan yang efektif. Dengan mengikuti standar-standar ini, tujuan tata pemerintahan yang baik dapat dicapai, yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah. Selain itu, ini membantu mengurangi korupsi administrasi. Pada akhirnya, hal ini mendorong akuntabilitas dan transparansi publik, yang menguntungkan fungsi pemerintahan daerah secara keseluruhan. Temuan penulis menyoroti adanya berbagai persoalan mengenai pemanfaatan anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan perlunya upaya pengembangan lebih lanjut. Temuan ini bertentangan dengan informasi yang dipaparkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Realisasi aktual proyek dan tingkat penyelesaian konstruksi jauh dari harapan yang tercermin dalam laporan keuangan, menunjukkan perbedaan antara angka yang dilaporkan dan situasi aktual. Selain itu, defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

yang terus menerus menunjukkan pola belanja yang berlebihan dan tidak efisien, sehingga semakin memperparah tantangan keuangan yang dihadapi pemerintah.

### **Pengaruh Aksesibilitas Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Analisis yang dilakukan memperlihatkan transparansi keuangan provinsi memiliki pengaruh signifikan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara dengan tingkat signifikansi sejumlah 0,019. Skor t-hitung sejumlah 2,384 melebihi skor t-tabel sejumlah 1,660 semakin menegaskan pentingnya hubungan antara faktor-faktor tersebut. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan terpengaruh oleh adanya transparansi informasi keuangan. Hal ini selaras dengan temuan Nurlaili pada tahun 2016 menemukan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh aksesibilitas laporan keuangan daerah. Memang, pemda dituntut untuk tidak sekadar memaparkan laporan keuangan dan memastikan aksesibilitasnya. Efektivitas upaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terhambat jika pengguna menghadapi kesulitan dalam mengakses laporan tersebut. Dengan mengutamakan kemudahan akses laporan keuangan, pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini, pada gilirannya, menumbuhkan kepercayaan dan mempromosikan pemahaman publik tentang praktik-praktik yang diadopsi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, memfasilitasi aksesibilitas terhadap laporan keuangan memainkan peran penting dalam memperkuat akuntabilitas dan mendorong tata kelola yang bertanggung jawab di tingkat daerah.

### **SIMPULAN**

Penyajian laporan keuangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara. Namun demikian, keuangan daerah sangat berperan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten yang sama. Selain itu, keberadaan laporan keuangan dan aksesibilitas keuangan daerah secara simultan berdampak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh

Utara. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara, sehingga belanja daerah menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi korupsi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aliyah, Siti ; Nahar, Aida. 2012. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Siti Aliyah Aida Nahar." *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8(2): 97–189.
- Arikunto. 2011. "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik / Suharsimi Arikunto | OPAC Perpustakaan Nasional RI." <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=217760> (May 29, 2023).
- Diamond, Jack. 2002. "Performance Budgeting: Is Accrual Accounting Required?" *IMF Working Papers* 02(240): 1.
- Hehanussa, Salomi J. 2015. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon." *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* 2(1): 82–90. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/294> (May 28, 2023).
- López-Arceiz, Francisco José, Ana José Bellostas Pérezgrueso, and María Pilar Rivera Torres. 2017. "Accessibility and Transparency: Impact on Social Economy." *Online Information Review* 41(1): 35–52.
- Mahsun, M. 2016. "Akuntansi Sektor Publik / Moh.Mahsun, Firma Sulistyowati, Heribertus Andre Purwanugraha | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar." *BPFE-Yogyakarta*. <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=100903> (May 29, 2023).
- Mulyana, B. 2006. "Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal akuntansi pemerintah*: 65–78. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/29394> (May 28, 2023).
- Sande, Peggy. 2013. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)." *Jurnal Akuntansi, 2013 - ejournal.unp.ac.id*: 1–20.
- Saragih, Charli Andreas. 2015. "The Influence of Regional Financial Statements and Financial Statement Accessibility on Financial Management Accountability(Study in SKPD Rokan Hilir District)." *Jom FEKON* 2(2): 1–16.
- Supardi. 2017. "Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis / Supardi ; Penyunting, Sobirin Malian | OPAC Perpustakaan Nasional RI." *UII Press Yogyakarta*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=578184> (May 29, 2023).